THE INDONESIAN Forum

THE INDONESIAN Forum

Seri 108

Kamis, 30 Mei 2024

Rangkuman DISKUSI

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

TEMA	**:**	**Demokrasi Indonesia di Mata Dunia**
Pemateri	**:**	1. Andrew Mantong - CSIS 2. Christina Clarissa Intania – The Indonesian Institute 3. Hemi Lavour Febrinandes – Associate Firma Themis
Moderator	**:**	**Arfianto Purbolaksono**
Partisipan	**:**	Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Pada kegiatan diskusi virtual yang diselenggarakan melalui Zoom ini menghadirkan tiga narasumber penting seperti Andrew Mantong (CSIS), Christina Clarissa Intania (The Indonesian Institute) dan Hemi Lavour Febrinandes (Associate Firma Themis). Dalam pengantar yang disampaikan oleh moderator menjelaskan bahwa demokrasi Indonesia saat ini tengah disorot oleh dunia. Oleh sebab itu, dalam diskusi diharapkan dapat memperoleh pencerahan terutama menyongsong menuju pemerintahan mendatang.

Christina Clarissa Intania menyampaikan beberapa poin pemantik pada pemaparannya yang berjudul "Hukum, Demokrasi, Indonesia dan Penilaian Indeks Demokrasi". Pada topik pemantik ini memuat tiga sub bagian bahasan seperti Relasi hukum dan demokrasi, Index demokrasi yang diterbitkan lembaga internasional dan Temuan praktik hukum Indonesia dan penilaian demokrasi.

Pada konteks Relasi hukum dan demokrasi memuat poin penjelasan dimana Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum memegang teguh konsep *rule of law*. *Rule of law* dan demokrasi saling memengaruhi satu sama lain. Hal ini kemudian menjadi fundamental untuk memajukan demokrasi dan untuk memperkuat rule of law perlu tercipta dalam situasi negara yang demokratis (Tommasoli, 2012). *Rule of law* dan demokrasi adalah dua atribut yang sama-sama diinginkan dalam sistem politik (Ferejohn dan Pasquino, 2003).

Selain itu, Index demokrasi yang diterbitkan lembaga internasional memiliki tujuan antara lain sebagai Bahan pertimbangan pembuatan kebijakan luar negeri untuk digunakan oleh jurnalis dalam liputan yang mendeskripsikan negara lain, Para pembuat kebijakan dan media memperjuangkan skor positif dan menggunakan skor negatif sebagai pembenaran untuk melakukan reformasi serta dapat digunakan ***World Bank*** untuk menyusun *Worldwide Governance Indicators* yang nantinya digunakan donor untuk memeriksa keefektifan program pembiayaan luar negeri.

Lebih lanjut, pada pemaparan materi selanjutnya yang disampaikan oleh Hemi Lavour Febrinandes sebagai Associate Firma Themis menjelaskan bahwa penurunan indeks demokrasi yang terjadi berdasarkan pelaporan lembaga Freedom House. Hemi sebagai narasumber akan menarik topik bahasan tersebut berdasarkan

bagaimana proses pembentukan perundang-undangan dan implementasinya dan bagaimana hal tersebut juga berimplikasi pada kekuasaan kehakiman yang tidak mampu menjadi barikade dalam melindungi proses termasuk apa yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi akhir-akhir ini.

Narasumber menjelaskan bahwa PSHK pada tahun 2020 lalu mengeluarkan hasil riset tentang gendutnya berbagai peraturan/perundang-perundangan disuatu lembaga kementerian yang pada akhirnya mengakibatkan hyperregulated. Berdasarkan organisasi *for economic and operation development* itu, memberikan rekomendasi dimana harus terdapat sebuah lembaga independen khusus yang mengawasi proses pembuatan peratuan/perundang-undangan dalam satu institusi kelembagaan negara dan ini terbukti membantu dalam meregulasi peraturan yang telah ada. Hiperregulasi yang terjadi juga dapat mengakibatkan kontradiksi di masyarakat.

Narasumber terakhir, Andrew Mantong sebagai peneliti hubungan internasional dari CSIS menjelaskan pemaparannya bagaimana situasi dunia saat ini memandang sistem demokratik, sistem internasional mengakomodasi hubungan demokrasi termasuk dalam kaitannya pada hubungan diplomatik /bilateral antara Indonesia dengan dunia terutama dalam konteks kebijakan di dalam maupun luar negeri.

Indonesia sampai saat ini dipercaya masih menganut kekuatan bebas aktif yang artinya, secara teoritis negara kita masih dipercaya dapat melepaskan dari berbagai kekuatan ekonomi negara manapun. Hal ini juga seragam dan dipercayai oleh sesama negara di asean. Artinya, seberapa jauh kita dapat melepaskan diri dari kekuatan ekonomi negara. Termasuk Indonesia masih mempercayai bahwa Amerika masih menjadi pemenang perang dunia II, dengan kekuatan militer dominan. Akan tetapi jika kita berbicara pada konteks tatanan internasional maka kita akan berbicara siapa yang paling kuat, secara kekuatan militer dan siapa yang memiliki basis nilai yang sama melalui aliansi-aliansi yang terbentuk.

Namun demikian, pada konteks perekonomian, kita menyadari bahwa semangat proteksionis dan *attitude* dibangun guna untuk melindungi industri dalam negeri Amerika. Amerika serikat sendiri menjustifikasi demokrasi dimulai dari perang Iraq yang sekaligus menjadi awal kehancuran dari perekonomian amerika serikat. Saat ini terdapat situasi yang ambigu pada Amerika serikat dalam mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi.

Diskusi

1. Mengapa lembaga negara seperti DPR, MK, KPK, Kejaksaan bahkan perguruan tinggi dan Organisasi Keagamaan seperti “NU” tidak berdaya menghadapi kekuasaan Eksektutif/Presiden? Mengapa tidak bisa menjadi penyeimbang dalam kehidupan demokrasi di Indonesia? Jelaskan.

   Pembahasan :
   Christina:
   ketika pembagian kekuasaan telah dilakukan berdasarkan fungsinya maka idealnya seharusnya dilakukan berdasarkan peran masing-masing. Namun demikian, hal ini tergantung pada itikad politik dari setiap pemegang kekuasaan.
   Hemi :
   secara formal, kita dapat melihat bagaimana komposisi yang ada dilegislatif dimana tidak adanya peran pengawasan yang terjadi seperti hak bertanya kepada presiden. Lalu peran masyarakat sipil bagaimanapun ormas memiliki peran penting terutama dalam memastikan pemenuhan hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia.

2. Perumusan kebijakan tidak sejalan dengan kebijakan yang seharusnya peraturan untuk kemaslahatan umum dan bukan sebagian itu tidak dapat membahagiakan semua orang yang tidak terakomodir pasti akan merasa dianulir/tidak diikutkan. Mengapa itu terjadi dan bagaimana mengakomodir semuanya? Bagaimana yang terbaik ?

   Pembahasan :
   Christina :
   Dalam mengakomodir semua kepentingan itu tidak mungkin terjadi. namun demikian dalam proses pembentukan peraturan perundangan hendaknya memenuhi syarat seperti pelibatan masyarakat untuk didengar pendapatnya.

3. Kak Christina dan Kak Hemi. Kita tahu di Indonesia, peran institusi keagamaan menjadi sentral dan signifikan sekali. Bahkan dalam beberapa hal, kadang jadi radikal. Nah, pertanyaannya seberapa kuatkah pengaruh ormas dan organisasi keagamaan lain ini dalam memberikan tekanan dalam hal penegakan hukum? Contoh banyak terjadi dalam kasus pembangunan rumah ibadah dan mungkin di banyak kasus lain.

   Pembahasan :
   Arfianto :
   The Indonesian institute tergabung dalam satgas kebebasan beragama (KBB), dimana dalam satuan tersebut kami menemukan banyak tantangan yang harus dijawab oleh pemimpin daerah. Pada umumnya pemimpin daerah banyak yang 'bertekuk lutut' kepada organisasi masyarakat (ormas) yang intoleran.

KESIMPULAN

Pada sesi penutup para narasumber menyampaikan pernyataan tertutupnya, dimana Christina menyampaikan bahwa perlunya dalam negara untuk mempertimbangkan demokrasi dalam proses pembuatan kebijakan. Kita harus optimis dengan negara kedepannya namun hal itu tentu dapat terjadi jika dilakukan dengan keterbukaan pemerintah untuk menerima setiap masukan. Selain itu, Hemi menyampaikan bahwa pentingnya pemimpin yang ideal yang tidak hanya mengandalkan popularitas. Demokrasi sudah berjalan ratusan tahun. Dan terakhir, menurut Andrew Menthong, kita masih memerlukan sistem demokrasi karena kita hidup dalam multikulturalisme. Harapannya kedepan akan tetap optimis karena kita masih memiliki pagar-pagar batasan yang harapannya menjadi bentuk sistem pertahanan dalam pemerintahan maupun kehidupan bernegara.

Catatan :
1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum

2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".

TERIMA KASIH ~